e-ISSN: 2580-6009 | p-ISSN: 0854-817x
https://jurnalpuitika.fib.unand.ac.id/
10.25077/puitika.v22i2.873

Puitika

Vol. 22, No. 2, 2026 | 79–92

Analisis Semiotika Roland Barthes terhadap Makna Kritik Politik dalam Lirik Lagu "Surat Buat Wakil Rakyat" Karya Iwan Fals

Lutfia Okta Riwayati[1]*, Anantha Anggryani Sitio[1], Dian Nastiti[1]
[1]Program Studi Karawitan, Fakultas Seni Pertunjukan, Institut Seni Indonesia Surakarta

lutfiaokta@isi-ska.ac.id

Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk membongkar proses signifikasi denotatif dan konotatif serta mengungkap mitos politik yang dikonstruksi dan didekonstruksi dalam lirik lagu "Surat Buat Wakil Rakyat" karya Iwan Fals yang dirilis pada 1987. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-interpretatif berlandaskan paradigma kritis, serta menerapkan kerangka semiotika dua tataran signifikasi (*two orders of signification*) dan teori mitos Roland Barthes sebagaimana dirumuskan dalam *Mythologies*. Data primer berupa teks lirik lagu dianalisis melalui matriks pemaknaan Barthesian yang memetakan unit tanda ke dalam tataran denotasi, konotasi, dan mitos, dengan data sekunder berupa literatur historis-politis Orde Baru sebagai konteks triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tataran denotatif, diksi seperti "kekenyangan" dan "tidur waktu sidang" hanya merekam aktivitas literal, namun pada tataran konotatif berekspansi menjadi kritik terhadap keserakahan elite, alienasi wakil rakyat dari konstituennya, serta komodifikasi politik. Pada tataran mitos, lirik ini berfungsi sebagai instrumen kontrahegemonik yang mendekonstruksi mitos resmi negara mengenai keluhuran dan kesucian institusi DPR, serta menyingkap realitas parlemen sebagai lembaga "tukang stempel" yang kehilangan fungsi *checks and balances*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa musik populer berperan sebagai ruang publik alternatif yang krusial dalam mengartikulasikan resistensi politik di tengah represi otoriter.

Kata Kunci
semiotika Roland Barthes; mitos; konotasi; kritik politik; Iwan Fals

Abstract
This study aims to unpack the processes of denotative and connotative signification and to reveal the political myth constructed and deconstructed in the lyrics of Iwan Fals's 1987 song "Surat Buat Wakil Rakyat" ("A Letter to the People's Representatives"). This research employs a qualitative method with a descriptive-interpretive approach grounded in a critical paradigm, applying the semiotic framework of the two orders of signification and Roland Barthes's theory of myth as formulated in Mythologies. The primary data, in the form of the song lyric text, were analyzed through a Barthesian matrix of meaning that maps sign units into the levels of denotation, connotation, and myth, with secondary data consisting of historical-political literature on the New Order regime serving as contextual triangulation. The findings show that at the denotative level, diction such as "kekenyangan" (being overstuffed/gorged) and "tidur waktu sidang" (sleeping during sessions) merely records literal activities; however, at the connotative level, these expand into criticism of elite greed, the alienation of people's representatives from their constituents, and the commodification of politics. At the mythical level, the lyrics function as a counter-hegemonic instrument that deconstructs the state's official myth of the nobility and sanctity of the House of Representatives (DPR) as an institution, exposing parliament as a mere "rubber-stamp" body that has lost its function of checks and balances. This study concludes that popular music serves as a crucial alternative public sphere for articulating political resistance amid authoritarian repression.

Keywords
Roland Barthes's semiotics, myth, connotation, political criticism, Iwan Fals

© 2026 The Author(s).
This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Common Attribution License (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

Pendahuluan

Karya seni, khususnya musik populer, tidak pernah lahir dari ruang hampa budaya yang steril. Ia bukan sekadar artikulasi estetika yang bersifat rekreatif semata, melainkan instrumen komunikasi massa yang andal dalam memotret dinamika sosial serta konstelasi politik pada era tertentu. Sebagai bagian dari ekspresi kebudayaan, lagu kerap dioptimalkan oleh para musisi untuk mengartikulasi ide, menyampaikan protes, hingga menggalang resistensi terhadap dominasi kekuasaan (Woo, 2024). Musik populer dalam lanskap politik sering kali beroperasi sebagai *counter-hegemony* (kontrahegemoni) ketika saluran komunikasi politik formal tersumbat oleh otoritas yang berkuasa. Melalui jalinan liriknya, seorang komposer menguraikan perspektif kritis secara naratif, sehingga melahirkan sebuah teks yang sarat akan lambang, metafora, dan makna implisit yang memerlukan penafsiran analitis secara komprehensif (Murigi, 2024).

Dalam konteks permusikan di Indonesia, Iwan Fals menonjol sebagai figur legendaris yang secara konsisten menggaungkan kritik sosiopolitik melalui karya-karyanya (Safi'i, 2022). Ketika rezim Orde Baru memberlakukan kontrol ketat terhadap kebebasan berekspresi dan melakukan depolitisasi massal melalui kebijakan massa mengambang (*floating mass*), Iwan Fals tampil mengemuka sebagai representasi suara kaum marginal yang terpinggirkan (Wahyudin & Absor, 2022). Musiknya menjadi jembatan sosiologis yang menyuarakan keresahan masyarakat kelas bawah, kaum urban yang teralienasi, hingga sentimen antikorupsi (Safi'i, 2022). Di antara sekian banyak karyanya, lagu bertajuk "Surat Buat Wakil Rakyat" yang diluncurkan pada 1987 lewat album *Wakil Rakyat* dinilai sebagai salah satu adikarya yang paling monumental sekaligus tetap kontekstual hingga era kontemporer. Album ini dirilis pada momentum politik yang sangat krusial, yakni menjelang Pemilihan Umum 1987, sebuah masa ketika mesin politik Orde Baru berada pada puncak kekuatannya untuk menyeragamkan suara publik.

Secara eksplisit maupun tersirat, lagu "Surat Buat Wakil Rakyat" memberikan sorotan tajam terhadap kinerja para legislator yang dianggap melalaikan tanggung jawab kepada konstituennya. Rangkaian kata dalam lirik tersebut melampaui batas fungsi tekstual konvensional; kata-kata tersebut menjadi simbolisasi rasa kecewa, sindiran satir, serta asimetri hubungan kekuasaan antara masyarakat dan representasinya di parlemen. Penggunaan diksi seperti "tidur waktu sidang" ataupun ungkapan "wakil rakyat seharusnya merakyat" bukan sekadar kiasan tanpa arti atau banyolan karikatural, melainkan penanda budaya (*cultural signifier*) dan penanda politik yang menyimpan makna sosiologis yang mendalam. Diksi tersebut merekam sebuah anomali moral dan politik dari institusi yang seharusnya memegang mandat kedaulatan rakyat.

Fenomena disfungsi parlementer yang dipotret oleh Iwan Fals bukanlah kritik yang lahir dari ruang kosong, melainkan respons artistik terhadap kondisi riil sistem politik Indonesia pada akhir dekade 1980-an (Darmawan, 2020). Negara pada masa itu menerapkan format demokrasi terbatas yang kemudian oleh para pengamat politik dijuluki "demokrasi semu" (*pseudo-democracy*) atau otoritarianisme birokratik (Rajab, 2022). Di bawah payung sistem ini, mekanisme elektoral formal tetap berjalan secara periodik, namun substansi kontestasi, pluralisme, dan representasi politiknya telah dilucuti jauh sebelum proses pemilihan berlangsung melalui penyederhanaan partai dan pengebirian ideologi oposisi (Suci & Suri, 2024).

Rezim Orde Baru, melalui kombinasi regulasi hukum yang represif, doktrin keamanan nasional (Kamtibmas), stabilitas makroekonomi, dan rekayasa kepartaian yang hegemonik, secara sistemik mereduksi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari lembaga representasi rakyat menjadi sekadar instrumen legitimasi kekuasaan eksekutif, yaitu fenomena yang sering disebut sebagai lembaga "tukang stempel" (*rubber stamp*) atas kebijakan Presiden (Simbolon

dkk., 2023). Dalam situasi otoriter tersebut, ruang kritik politik yang terbuka secara formal, baik melalui pers yang dibayangi ancaman pembredelan (SIUPP), partai oposisi yang dipasung, maupun mimbar akademik yang dikebiri melalui Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan (NKK/BKK) mengalami penyempitan drastis. Akibatnya, teks-teks kebudayaan populer seperti lagu menjelma menjadi salah satu saluran artikulasi politik alternatif yang masih relatif "aman" untuk ditembusi kritik tajam, meskipun dalam praktiknya para musisi, termasuk Iwan Fals, sering berhadapan dengan interogasi aparat, sensor ketat, pencabutan izin panggung, hingga pembatasan siaran di media elektronik negara (TVRI dan RRI) (Fiddaraini, 2025).

Persoalan inilah yang melatarbelakangi urgensi penelitian ini. Sebuah teks lirik lagu, betapapun sederhananya susunan katanya secara denotatif, dapat menyimpan muatan ideologis berlapis serta kepentingan diskursif yang hanya dapat diungkap melalui instrumen analisis yang mampu menembus permukaan bahasa. Lirik lagu tidak sekadar mencerminkan realitas, melainkan secara aktif mengonstruksi ulang realitas tersebut dalam sistem tanda yang otonom. Maka, guna membedah secara tuntas substansi kritik politik yang ada dalam narasi lirik tersebut, diperlukan instrumen metodologis yang mampu menguliti teks melampaui permukaan literalnya.

Pendekatan yang relevan sebagai fondasi teoretis dalam studi ini adalah semiotika, yakni disiplin ilmu yang mengeksplorasi sistem tanda, signifikasi, dan pembentukan makna. Secara spesifik, studi ini menerapkan kerangka teoretis semiotika yang digagas oleh Roland Barthes. Model dua tingkat signifikasi (*two-orders of signification*) yang memisahkan denotasi dan konotasi, serta teori mitos yang dirumuskannya dalam "Myth Today", merupakan pisau analisis yang dipandang paling tepat dalam studi ini (Jadou & Ghabra, 2021). Kerangka Barthesian ini memungkinkan peneliti untuk membongkar bagaimana sebuah teks budaya populer tidak hanya menyampaikan pesan kritis, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen dekonstruksi terhadap mitos-mitos politik, seperti mitos "keharmonisan", "perwakilan rakyat yang luhur", dan "stabilitas" yang sengaja dibangun dan dipelihara oleh kekuasaan rezim demi melanggengkan status quo.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini diarahkan untuk menjawab dua pertanyaan pokok, yaitu bagaimana proses signifikasi denotatif dan konotatif berlangsung dalam lirik lagu "Surat Buat Wakil Rakyat" karya Iwan Fals, mitos politik apa yang dibangun oleh rezim Orde Baru mengenai institusi parlemen, dan bagaimana mitos tersebut dibongkar oleh teks lirik melalui mekanisme pemaknaan tingkat kedua (konotasi) menuju pembentukan mitos tandingan ala Roland Barthes. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis pada kajian semiotika musik populer di Indonesia, sekaligus kontribusi empiris dalam memperkaya pemahaman sejarah sosial-politik mengenai peran kebudayaan populer sebagai ruang publik alternatif (*alternative public sphere*) di tengah cengkeraman pembatasan politik yang otoriter.

Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-interpretatif yang berlandaskan paradigma kritis (*critical paradigm*) (Supriyono, 2024). Pemilihan paradigma kritis bukan sekadar preferensi metodologis, melainkan konsekuensi logis dari sifat objek kajian itu sendiri: lirik lagu sebagai teks budaya tidak dapat dipahami secara utuh apabila dilepaskan dari konteks relasi kuasa yang melingkupinya. Paradigma kritis dalam penelitian ini berfungsi sebagai lensa epistemologis yang menolak asumsi bahwa teks bersifat netral, dan sebaliknya memandang teks sebagai medan pertarungan makna (*site of ideological struggle*) antara wacana dominan (hegemonik) dan wacana tandingan (kontrahegemonik) (Adom, Hussein, & Agyem, 2018). Penelitian kualitatif dipilih karena

karakteristik data yang dikaji—simbol, metafora, dan struktur naratif dalam lirik —bersifat tekstual, kontekstual, dan multitafsir, sehingga tidak dapat direduksi menjadi data numerik tanpa kehilangan kedalaman maknanya.

Penelitian ini bersifat deskriptif-kualitatif dalam arti bahwa tujuannya bukan untuk menguji hipotesis atau mengukur hubungan kausal antarvariabel, melainkan untuk mengurai sekaligus membongkar lapisan-lapisan makna yang terkandung dalam teks secara sistematis dan mendalam. Sifat deskriptif ini memungkinkan peneliti menjelaskan secara naratif bagaimana tanda bahasa bekerja dalam membentuk makna pada tataran denotasi, konotasi, hingga mitos, tanpa harus mereduksi kekayaan estetik dan musikal karya yang dikaji.

Penelitian ini menggunakan metode analisis semiotika dengan model *two-orders of signification* yang dikembangkan oleh Roland Barthes (Rudy, 2024). Barthes mengembangkan gagasan dasar Ferdinand de Saussure mengenai relasi penanda (*signifier*) dan petanda (*signified*) menjadi sistem pemaknaan bertingkat yang lebih kompleks dan terbagi ke dalam tiga tataran utama. Tataran pertama adalah denotasi (*denotative meaning*), yaitu makna harfiah, literal, dan eksplisit dari tanda bahasa sebagaimana dipahami secara umum serta disepakati secara konvensional dalam suatu bahasa. Pada tataran denotatif ini, relasi antara penanda dan petanda masih bersifat langsung, objektif, dan belum terintervensi oleh muatan politis di luar teks.

Sistem ini kemudian berkembang pada tataran kedua, yaitu konotasi (*connotative meaning*), yang muncul ketika tanda denotatif pada tataran pertama (gabungan penanda dan petanda) beralih fungsi menjadi penanda baru bagi petanda yang lebih luas. Pada tataran konotatif inilah subjektivitas pembaca serta konteks sosial, historis, budaya, dan ideologis mulai memainkan peran penting dalam memproduksi makna yang lebih dalam. Puncak dari sistem semiologis tataran kedua ini adalah mitos (*myth*), yaitu konotasi yang berulang dan terlembagakan secara sistematis lambat laun dibekukan menjadi sebuah “kebenaran” kolektif yang dianggap alamiah, wajar, dan tidak lagi dipertanyakan oleh masyarakat (Barus dkk., 2025).

Barthes menegaskan bahwa fungsi utama mitos adalah menaturalisasi ideologi, yakni mengubah sesuatu yang sebenarnya merupakan konstruksi sosial-historis (kultural) agar tampak seolah-olah bersifat alamiah dan ahistoris (Rudy, 2024). Dalam konteks penelitian ini, mitos yang hendak dibongkar adalah gagasan tentang keluhuran, kesucian, dan kewibawaan institusional wakil rakyat atau parlemen yang sengaja dilanggengkan oleh wacana resmi negara Orde Baru, sementara realitas empiriknya justru menunjukkan disfungsi struktural. Pemilihan kerangka Barthesian ini dinilai sangat relevan secara metodologis karena mampu menjembatani analisis linguistik mikro, seperti pilihan diksi, majas, metafora, dan personifikasi, dengan analisis ideologis makro berupa kritik terhadap struktur kekuasaan negara. Hal ini selaras dengan tujuan penelitian untuk membongkar artikulasi kritik politik di balik teks lirik lagu “Surat Buat Wakil Rakyat” yang tampak sederhana di permukaan, tetapi padat secara ideologis.

Sejalan dengan prinsip metodologi semiotik yang membedakan secara tegas antara objek material dan objek formal, batasan objek dalam penelitian ini dijabarkan secara terpadu. Objek material penelitian ini bertumpu pada teks lirik lagu “Surat Buat Wakil Rakyat” karya Iwan Fals yang dirilis dalam album *Wakil Rakyat* pada 1987. Sementara itu, objek formal dalam penelitian ini difokuskan pada tanda-tanda kebahasaan yang meliputi aspek leksikal, gramatikal, dan figuratif, serta struktur semiotis yang merepresentasikan kritik politik dan proses dekonstruksi mitos kekuasaan dalam teks tersebut, yang ditelaah menggunakan kerangka dua tataran signifikasi milik Barthes.

Penelitian ini menggunakan dua kategori sumber data yang saling melengkapi untuk memperkuat analisis. Data primer berupa teks lirik lagu “Surat Buat Wakil Rakyat” yang diperoleh dari rilisan resmi album fisik maupun digital serta versi lirik yang telah dipublikasikan secara sah, kemudian disandingkan dan diverifikasi ulang dengan transkripsi

audio untuk menjamin akurasi data tekstual akibat adanya variasi penulisan di berbagai platform digital. Adapun data sekunder dalam penelitian ini berupa literatur pendukung yang meliputi dokumen historis dan jurnalistik mengenai konteks sosio-politik Orde Baru, khususnya terkait represi terhadap kebebasan berekspresi dan ruang publik, kajian akademik terdahulu mengenai musik sebagai medium resistensi politik, serta literatur teoretis mengenai semiotika Barthes sebagai pisau analisis utama.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan yang berkesinambungan. Tahap awal dimulai dengan transkripsi dan segmentasi teks, yaitu lirik lagu ditranskripsi secara lengkap, kemudian dibagi ke dalam unit-unit analisis berupa bait (stanza) dan larik (verse) untuk memudahkan pengodean. Selanjutnya, identifikasi unit tanda, yaitu proses menandai satuan-satuan tanda bahasa yang berpotensi mengandung makna konotatif politis, meliputi aspek diksi, majas seperti personifikasi, metafora, sarkasme, dan ironi, hingga struktur naratif alur "surat" sebagai retorika protes. Tahap ini diikuti dengan pencatatan dan pengodean tiap unit tanda ke dalam lembar kerja analisis yang memuat kolom penanda, petanda denotatif, serta catatan konteks sosiohistoris yang relevan. Akhirnya, peneliti melakukan studi dokumentasi kontekstual dengan menelusuri dokumen sejarah dan pemberitaan masa Orde Baru mengenai isu korupsi, kolusi, manipulasi suara, hingga kesenjangan kelas sebagai bahan triangulasi konteks untuk pemaknaan konotatif.

Analisis data dilakukan melalui penyusunan matriks pemaknaan Barthesian (*Barthesian signification matrix*) yang memisahkan secara rigid tiga tataran pemaknaan secara dialektis. Instrumen ini disusun secara linier mencakup kolom nomor, unit tanda berupa larik atau frasa, penanda dan petanda denotatif, ekspansi konotatif berbasis konteks sosiohistoris dan ekonomi-politik, serta kolom akhir berupa mitos yang dibongkar.

Proses analisis ini diaplikasikan secara sistematis melalui empat tahapan utama yang saling berkesinambungan. Langkah pertama dimulai dengan tahap deskripsi denotatif, di mana peneliti memaparkan makna literal atau makna kamus dari tiap unit tanda yang telah diidentifikasi tanpa melibatkan interpretasi sosiopolitis terlebih dahulu guna membangun fondasi pemaknaan yang objektif. Setelah fondasi denotatif terbentuk, analisis dilanjutkan ke tahap ekspansi konotatif dengan cara mengaitkan makna denotatif tersebut dengan konteks sosiohistoris dan ekonomi-politik Orde Baru pada akhir dekade 1980-an, seperti represi kebebasan pers, hegemoni kepartaian secara *de facto*, dan kesenjangan akut antara elite dan rakyat, sehingga makna tanda mengembang melampaui batas literalnya.

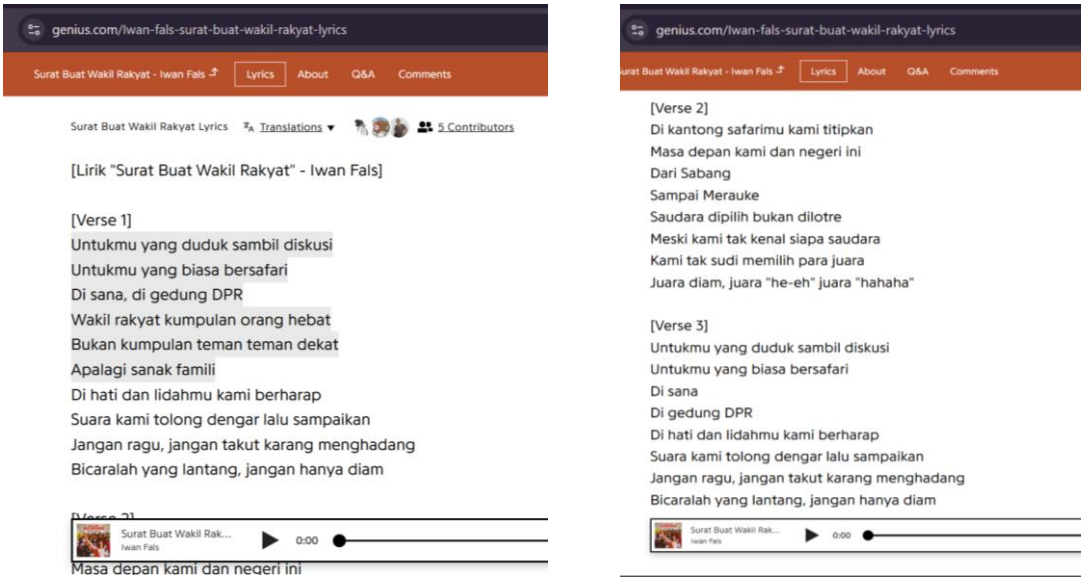
Memasuki tahapan ketiga, peneliti melakukan identifikasi dan pembongkaran mitos untuk membedah mitos dominan yang masih dipertahankan dalam wacana resmi negara, seperti mitos wakil rakyat sebagai representasi suara rakyat yang luhur dan amanah. Pada tahap ini, peneliti menunjukkan bagaimana susunan tanda dalam lirik lagu justru bekerja membongkar (*demystify*) mitos tersebut melalui penggunaan ironi, sarkasme, dan personifikasi yang menyingkap disfungsi struktural di balik layar kekuasaan. Rangkaian analisis ini diakhiri dengan tahap sintesis interpretatif ketika peneliti merangkai kembali seluruh temuan dari ketiga tataran makna tersebut menjadi sebuah narasi argumentatif yang koheren. Sintesis ini bertujuan untuk memetakan bagaimana lirik lagu "Surat Buat Wakil Rakyat" berfungsi sebagai artikulasi kritik politik sekaligus praktik kontrahegemonik terhadap kekuasaan Orde Baru, serta melihat sejauh mana relevansi dan resonansi teks tersebut terhadap dinamika politik transisional kontemporer.

Untuk menjamin keabsahan dan kredibilitas interpretasi mengingat sifat data kualitatif yang cenderung multitafsir, penelitian ini menerapkan tiga strategi keabsahan data secara ketat. Pertama, peneliti menerapkan triangulasi sumber dengan menyandingkan hasil interpretasi mandiri dengan literatur sejarah Orde Baru serta berbagai kajian akademik terdahulu mengenai musik Iwan Fals sebagai wacana perlawanan, agar terhindar dari interpretasi yang bersifat

subjektif-impresionistik semata (Darmawan, 2020). Kedua, dilakukan *intersubjectivity check* atau diskusi sejawat (*peer debriefing*) dengan pihak yang memiliki kompetensi mumpuni dalam kajian semiotika maupun sejarah politik Indonesia untuk menguji konsistensi logis bangunan interpretasi peneliti. Ketiga, peneliti melakukan *member checking* konseptual terhadap kerangka teori untuk memastikan bahwa tiap penerapan konsep denotasi, konotasi, dan mitos tetap konsisten dengan rumusan asli Roland Barthes dalam buku *Mythologies* dan *Elements of Semiology* demi menghindari bias serta distorsi teoretis selama proses analisis data berlangsung (Smith, 1983).

Hasil dan Pembahasan

Pada bagian ini disajikan hasil pembacaan lirik "Surat Buat Wakil Rakyat" beserta pembahasannya. Penelusuran pesan politis dalam rangkaian bait lagu tersebut memerlukan pisau analisis yang menjangkau lapisan makna yang tersembunyi. Semiotika dipilih sebagai pijakan teoretis karena bidang ini memusatkan perhatian pada tanda, penandaan, serta lahirnya makna (Mukminin dkk., 2024). Secara lebih terarah, kerangka yang diterapkan berasal dari gagasan Roland Barthes, yang membagi kerja penandaan ke dalam dua tataran: denotasi pada lapis pertama dan konotasi yang bermuara pada mitos pada lapis kedua. Berpijak pada kerangka tersebut, pemaparan berikut disusun secara bertahap, dimulai dari makna denotatif unit-unit tanda dalam lirik, dilanjutkan ke perluasan maknanya pada tataran konotatif, hingga pembongkaran mitos politik yang bekerja di baliknya.



Gambar 1. Lirik Lagu "Surat Buat Wakil Rakyat"
(Sumber: https://genius.com/Iwan-fals-surat-buat-wakil-rakyat-lyrics)

Barthes mentransformasi fondasi semiotika linguistik Ferdinand de Saussure ke dalam skema analisis signifikasi dua tingkat (*two-orders of signification*). Model ini secara struktural memisahkan pembentukan penanda (*signifier*) dan petanda (*signified*) ke dalam tatanan bertingkat yang menjabarkan dimensi denotasi (makna literal), konotasi (makna kultural atau ideologis), hingga ranah mitos (Barus dkk., 2025). Lewat mekanisme pemaknaan berjenjang ini, Barthes memformulasikan bagaimana elemen tanda dalam teks dikonstruksikan sedemikian rupa, baik untuk memperkokoh hegemoni ideologi tertentu maupun untuk mendekonstruksi realitas politik yang hegemonik (Zhang, 2017).

Untuk memahami bagaimana sebuah tanda linguistik bermutasi menjadi instrumen ideologis yang menjustifikasi *status quo*, penafsiran tidak boleh berhenti pada tatanan konotasi permukaan. Analisis semiotika dalam penelitian ini bertumpu secara mendalam pada gagasan ekspansif Roland Barthes yang tertuang dalam karya monumentalnya, *Mythologies* (terjemahan bahasa Inggris dirilis pada 1972). Melalui buku tersebut, khususnya pada bab konseptual

penutup yang berjudul "Myth Today", Barthes merumuskan rute teoretis tentang proses kebudayaan, politik, dan bahasa sehari-hari dikomodifikasi menjadi mitos modern.

Barthes menegaskan sebuah tesis radikal: "Myth is a type of speech" (Mitos adalah sebuah sistem komunikasi, sebuah pesan). Mitos bukanlah sebuah objek, konsep, ataupun gagasan murni yang statis, melainkan sebuah moda penandaan (*a mode of signification*) dan sebuah bentuk (*a form*). Artinya, apa saja dapat menjadi mitos selama ia ditransmisikan melalui diskursus kebudayaan. Mitos tidak ditentukan oleh objek pesannya, melainkan oleh cara pesan tersebut disampaikan.

Di dalam bab "Myth Today", Barthes membedah formalisasi mitos melalui modifikasi skema struktural Saussurean menjadi sistem semiologi tingkat kedua (*a second-order semiological system*). Sebagai sistem dua tingkat, mitos bekerja dengan cara menunggangi sistem bahasa pertama yang sudah ada (*language-object*), lalu membangun dirinya sendiri sebagai metabahasa (*metalanguage*).

Operasionalisasi struktural dalam "Myth Today" membagi komponen mitos menjadi tiga elemen esensial yang memiliki ambivalensi fungsi.

1. Penanda (*signifier*) dalam mitos/bentuk: Penanda pada tingkat mitos ini memiliki watak paradoksikal. Di satu sisi, ia merupakan tanda akhir dari tatanan linguistik pertama (gabungan penanda dan petanda denotatif). Namun, ketika masuk ke tatanan mitos, ia menanggalkan sejarah dan kedalaman maknanya, lalu menyusut menjadi sekadar bentuk (*form*) kosong yang siap diisi.
2. Petanda (*signified*) dalam mitos/konsep: Konsep yang sarat muatan historis, intensi kebudayaan, dan kepentingan ideologis. Konsep ini tidak bersifat abstrak, melainkan memiliki dorongan fungsional untuk menaturalisasi situasi tertentu. Konsep dalam mitos menginvestasikan kembali situasi historis ke dalam bentuk kosong tersebut.
3. Tanda (*sign*) dalam mitos/signifikasi: Produk akhir dari asosiasi antara bentuk dan konsep. Di sinilah mitos bekerja sepenuhnya sebagai mitos: ia bertindak sebagai instrumen distorsi makna.

Inti dari mekanisme teori "Myth Today" adalah proses naturalisasi sejarah (*the naturalization of history*). Barthes menjelaskan bahwa tugas utama mitos adalah mengubah kebudayaan (*culture*) menjadi sesuatu yang alamiah (*nature*). Mitos bekerja dengan cara melucuti nilai historis, kontingensi politik, dan kepentingan kelas dari sebuah fakta kemanusiaan, kemudian menyajikannya kembali kepada masyarakat seolah-olah hal tersebut merupakan fakta alamiah, universal, objektif, dan sudah semestinya terjadi (*innocent speech*). Mitos tidak menyembunyikan sesuatu; tugasnya bukan menipu atau berbohong; tugas mitos adalah mendistorsi dan menjustifikasi nilai-nilai ideologis agar diterima tanpa resistensi.

Melalui pisau analisis "Myth Today", teks lirik lagu tidak lagi dipandang sekadar sebagai susunan estetis nada dan kata, melainkan sebagai medan pertarungan semiotis. Teks tersebut bekerja membongkar metabahasa penguasa yang selama ini menaturalisasi disfungsi institusi politik melalui mitos-mitos stabilitas, keluhuran, dan keterwakilan publik.

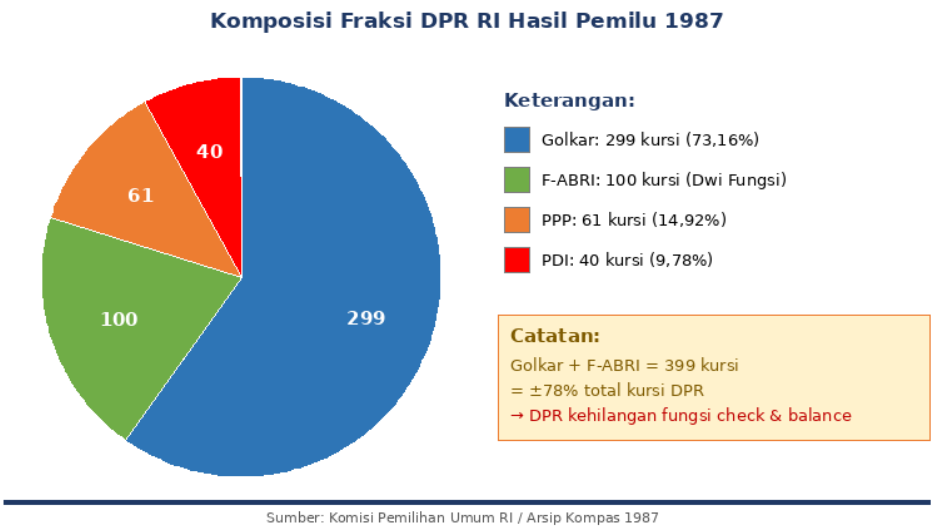
Konteks Historis: Politik Orde Baru 1987, Pemilu, Hegemoni Golkar, dan Disfungsi Fraksi DPR

Analisis konotasi dan pembongkaran mitos terhadap lirik lagu "Surat Buat Wakil Rakyat" yang dirilis oleh Iwan Fals pada 1987 tidak dapat dilepaskan dari lanskap sosiopolitis makro Indonesia pada tahun tersebut. Tahun 1987 merupakan salah satu titik kulminasi hegemoni politik rezim Orde Baru di bawah Presiden Soeharto, yang ditandai dengan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) kelima pada tanggal 23 April 1987. Pemilu 1987 ini menjadi konteks historis

yang sangat krusial karena secara langsung memengaruhi konstruksi teks, sinisme publik, dan radikalitas kritik yang dilayangkan oleh Iwan Fals.

Secara politis, Pemilu 1987 berjalan di bawah payung regulasi "massa mengambang" (*floating mass*) dan penyeragaman ideologi melalui Asas Tunggal Pancasila yang diundangkan dalam UU No. 3 Tahun 1985. Regulasi ini secara efektif mematikan fungsi kritis partai politik oposisi dan membatasi ruang gerak politik rakyat hingga ke tingkat akar rumput. Konstelasi fraksi-fraksi di DPR hasil Pemilu 1987 menampilkan dominasi mutlak yang asimetris dari mesin politik penguasa:

1. Golongan Karya (Golkar): Meraih kemenangan mutlak dengan perolehan suara mencapai 73,16% yang dikonversikan menjadi 299 kursi di DPR. Golkar bertindak sebagai perpanjangan tangan eksekutif yang bertugas mengamankan seluruh kebijakan regulatif rezim.
2. Fraksi ABRI (F-ABRI): Melalui doktrin Dwi Fungsi ABRI, faksi militer secara otomatis mendapatkan jatah 100 kursi di parlemen tanpa melalui proses pemilihan. Keberadaan F-ABRI memperkuat barisan pendukung pemerintah (birokrat-militer) yang menjamin stabilitas keamanan nasional di atas mimbar sidang.
3. Partai Persatuan Pembangunan (PPP): Mengalami penurunan suara yang sangat drastis akibat konflik internal dan kewajiban menanggalkan identitas Islam sebagai asas partai, sehingga hanya memperoleh 61 kursi.
4. Partai Demokrasi Indonesia (PDI): Meskipun mulai menunjukkan geliat kebangkitan dengan menggalang figur Megawati Soekarnoputri untuk menarik massa muda (dikenal dengan fenomena "Badai Merah" 1987), PDI tetap berada di posisi buncit dengan perolehan 40 kursi.



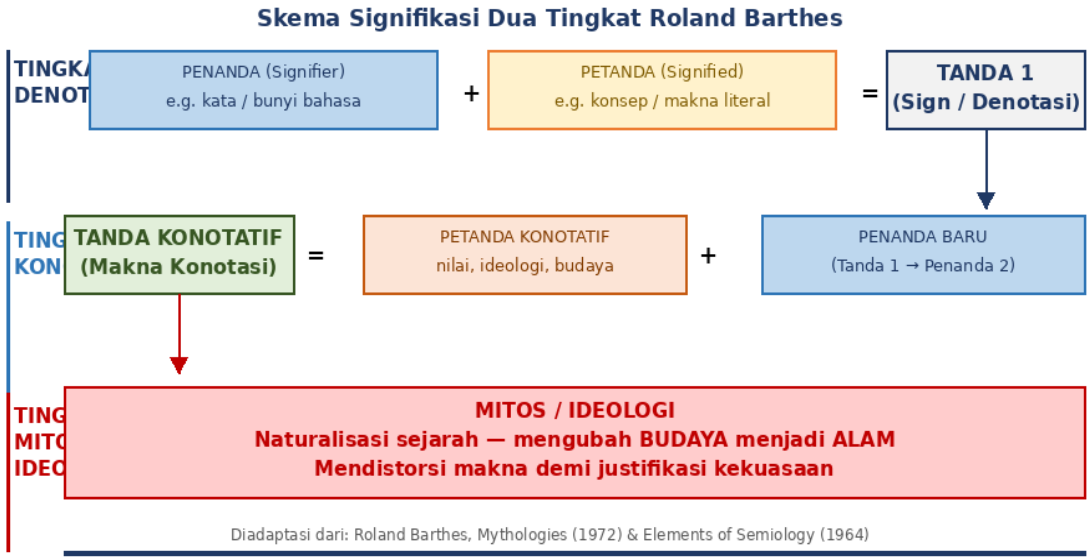
Gambar 2. Komposisi Fraksi DPR RI Hasil Pemilu 1987. Golkar dan F-ABRI menguasai ±78% total kursi, menjadikan DPR kehilangan fungsi check & balance terhadap eksekutif
(Sumber: Komisi Pemilihan Umum RI/Arsip Kompas 1987).

Dengan konfigurasi parlemen yang dikuasai oleh koalisi dominan Golkar dan F-ABRI (menguasai hampir 80% total kursi), DPR pada 1987 kehilangan fungsi utamanya sebagai lembaga kontrol atau pengawas jalannya pemerintahan (*checks and balances*). Parlemen bermutasi menjadi lembaga yang sekadar melegitimasi keinginan eksekutif, sebuah mekanisme politik yang secara akademis sering disebut sebagai "DPR Tukang Stempel" (*rubber-stamp parliament*). Semua keputusan diambil melalui retorika "musyawarah mufakat" yang semu, ketika interupsi, perdebatan substansial, dan oposisi nyata dianggap sebagai tindakan subversif yang mengancam stabilitas nasional.

Operasionalisasi Kerangka Pemaknaan Bertingkat Roland Barthes

Kerangka pemaknaan Roland Barthes dalam penelitian ini digunakan untuk menguliti teks lagu melampaui makna kebahasaan yang tampak di permukaan. Barthes membagi signifikasi menjadi dua tatanan utama. Tatanan pertama adalah denotasi, yang merupakan relasi antara penanda (*signifier*) kebahasaan dan petanda (*signified*) menghasilkan makna kamus yang bersifat objektif, literal, dan langsung. Tatanan kedua adalah konotasi, sebuah sistem yang lahir ketika tanda pada tingkat denotasi beralih fungsi menjadi penanda baru, yang kemudian dilekati oleh petanda lain berupa sistem nilai, emosi, atau aspek sosiokultural penafsir.

Akumulasi penafsiran konotatif yang mengkristal dan diterima secara natural dalam suatu masyarakat pada akhirnya melahirkan apa yang disebut Barthes sebagai mitos (*myth*). Mitos memegang peran ideologis karena ia menjustifikasi atau menaturalisasi pesan budaya yang sarat kepentingan politik penguasa, seolah-olah pesan tersebut merupakan kebenaran universal yang tak terbantahkan. Pemetaan teoretis ini dirangkum dalam diagram konseptual pada Gambar 3 berikut.



Gambar 3. Skema analisis dua tingkat signifikasi Barthesian. Tanda linguistik bertransformasi dari makna literal (denotasi) menuju makna ideologis (konotasi), hingga membentuk mitos (Sumber: diadaptasi dari Barthes, 1972).

Untuk memudahkan penelusuran makna, peneliti menyusun tabel matriks yang memilah unit tanda terpilih ke dalam pembagian struktur tanda Barthesian. Dari keseluruhan bait, dipilih tiga unit tanda secara purposif dengan mempertimbangkan kepadatan muatan konotatifnya serta keterkaitannya yang paling eksplisit dengan kritik terhadap lembaga perwakilan, sebagaimana tertera pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Matriks Analisis Semiotika Barthes terhadap Lirik Lagu "Surat Buat Wakil Rakyat"

No.	Kutipan Lirik Lagu (Penanda I)	Makna Denotatif (Tingkat I)	Makna Konotatif (Tingkat II)	Mitos / Ideologi Politik yang Dibongkar
1	"Untukmu yang duduk sambil membaca telanjur kekenyangan"	Seseorang yang sedang berada dalam posisi duduk di sebuah kursi sambil membaca dokumen teks dalam kondisi perut terisi makanan secara berlebih.	Simbol keistimewaan (privilese) ekonomi, kelimpahan fasilitas birokrasi, serta kenyamanan material kelas penguasa yang kontras dengan realitas rakyat miskin.	Mitos Integritas Parlemen: Meruntuhkan klaim bahwa parlemen merupakan dewan suci yang menderita demi rakyat, mengekspos watak hedonistik borjuasi birokrat.

2	"Wakil rakyat seharusnya merakyat, jangan tidur waktu sidang"	Seruan agar seorang utusan politik memiliki gaya hidup yang membaur dengan rakyat dan tidak memejamkan mata atau tertidur saat rapat resmi sedang berjalan.	Kritik atas disfungsi struktural parlemen, ketidakpedulian massal wakil rakyat, serta hilangnya rasa empati dan tanggung jawab moral terhadap nasib konstituen.	Mitos Demokrasi Pancasila Orba: Membongkar kenyataan bahwa musyawarah mufakat di parlemen Orde Baru hanyalah panggung sandiwara formalitas yang pasif.
3	"Di kantong baju mu ada kami, di dalam dompet mu ada kami"	Pernyataan bahwa eksistensi fisik atau nama rakyat berada di dalam saku pakaian serta dompet penyimpanan uang milik anggota dewan.	Simbol komodifikasi politik, di mana nasib rakyat hanya dijadikan komoditas dan jaminan finansial pribadi pejabat untuk menumpuk kekayaan material.	Mitos Kedaulatan Rakyat: Menyingkap kepalsuan slogan "Dari Rakyat, Oleh Rakyat, Untuk Rakyat" menjadi "Rakyat Diperas untuk Kepentingan Pejabat".

Analisis Dimensi Denotatif: Permukaan Literal Bahasa

Pada tatanan denotasi, lirik lagu “Surat Buat Wakil Rakyat” dibangun menggunakan susunan kata benda dan kata kerja konvensional yang merekam realitas aktivitas keseharian institusi negara. Klausa “duduk sambil membaca” secara denotatif merepresentasikan tindakan administratif yang umum dilakukan di ruang-ruang rapat pemerintahan. Tidak ada anomali bahasa pada struktur ini; semuanya berjalan sesuai dengan kaidah sintaksis bahasa Indonesia secara universal. Begitu pula dengan klausa “jangan tidur waktu sidang” yang merujuk langsung pada aktivitas fisiologis manusiawi, yaitu hilangnya kesadaran akibat kelelahan atau kantuk di tengah agenda formal.

Namun, Iwan Fals sengaja menyandingkan tindakan-tindakan literal ini dengan diksi yang bermuatan sensual-inderawi yang kuat, seperti “kekenyangan”. Keadaan kenyang secara denotatif hanyalah indikator biologis setelah mengonsumsi nutrisi secara optimal. Walakin, penempatan kata ini di tengah-tengah deskripsi ruang sidang anggota legislatif yang terhormat menimbulkan tegangan makna yang tidak biasa. Di sinilah letak kejeniusan Iwan Fals, ia menggunakan kejujuran denotatif untuk memancing pembaca/pendengar melompat menuju pemaknaan tingkat dua yang jauh lebih mendalam dan politis.

Analisis Ekspansi Konotatif: Menguliti Realitas Sosiopolitis

Ketika melangkah ke tatanan konotasi, penanda-penanda denotatif di atas bergeser secara radikal. Tanda denotatif “duduk... telanjur kekenyangan” tidak lagi dimaknai sebagai urusan pencernaan biologis semata, melainkan menjelma menjadi metafora sosiologis yang sangat tajam. “Kekenyangan” dikonotasikan sebagai akumulasi modal kekuasaan yang berlebih, keserakahan ekonomi, serta kematian kepekaan sosial (*social numbness*) pada aparat birokrasi negara. Di tengah kungkungan kemiskinan struktural masyarakat Indonesia pada dekade 1980-an, lirik ini mengonotasikan adanya jurang asimetris yang sangat lebar antara kemakmuran elit politik dan penderitaan massa rakyat (Varianus, 2024).

Kritik konotatif ini makin diperdalam melalui baris lirik kedua, “wakil rakyat seharusnya merakyat, jangan tidur waktu sidang”. Di sini, Iwan Fals memainkan oposisi biner yang sangat kontras antara kata “wakil rakyat” dan “merakyat”. Secara konotatif, ia mengindikasikan adanya alienasi akut: mereka yang dipilih oleh rakyat justru mengalami keterasingan dari realitas kehidupan konstituen yang memilihnya. Narasi “tidur waktu sidang” dikonotasikan bukan sekadar rasa kantuk fisik, melainkan bentuk pengkhianatan struktural terselubung (*veiled betrayal*). Sidang yang secara hukum ketatanegaraan bernilai sakral sebagai ruang artikulasi nasib jutaan nyawa, dikonotasikan jatuh menjadi ruang formalitas yang hampa, pasif, dan menjemukan bagi para anggotanya sendiri.

Ekspansi makna yang tidak kalah destruktif tampak pada lirik "di kantong baju mu ada kami, di dalam dompet mu ada kami". Secara konotatif, Iwan Fals menelanjangi praktik komodifikasi politik. Keberadaan kata "kami" (rakyat) di dalam "kantong" dan "dompet" pejabat publik bukanlah simbol perlindungan atau kedekatan emosional. Sebaliknya, kata tersebut mengonotasikan eksploitasi, di mana penderitaan, suara, dan hak-hak konstitusional masyarakat akar rumput direduksi dan dikonversi menjadi komoditas ekonomi politik demi mempertebal pundi-pundi kekayaan personal serta kelompok elit yang berkuasa.

Pembongkaran Mitos Politik: Dekonstruksi Hegemoni Parlemen Orde Baru

Pada puncak analisis semiotika Barthesian, yaitu ranah mitos, teks lirik lagu ini beroperasi bukan lagi sebagai karya seni hiburan, melainkan sebagai instrumen kontrahegemonik yang sangat subversif. Rezim Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto secara masif memproduksi mitos politik melalui doktrinasi di lembaga-lembaga formal negara. Mitos dominan yang disebarkan saat itu adalah bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan perwujudan agung dari mufakat musyawarah murni, pilar kestabilan politik, serta lembaga suci yang bekerja tanpa lelah demi kemaslahatan pembangunan nasional.

Melalui untaian lirik dalam lagu "Surat Buat Wakil Rakyat", Iwan Fals berhasil meretakkan kesadaran palsu tersebut dengan menyodorkan mitos tandingan (*counter-myth*). Mitos keagungan parlemen didekonstruksi total dan ditunjukkan wajah aslinya bahwa lembaga legislatif pada masa itu telah mengalami reduksi peran yang parah menjadi sekadar institusi stempel (*rubber stamp parliament*). Harmoni di dalam ruang sidang yang dicitrakan oleh media massa milik negara dibongkar oleh Iwan Fals sebagai bentuk kebisuan massal yang dipaksakan akibat represi militeristik yang mencekik (Wahyudin & Absor, 2022).

Melalui pembongkaran mitos ini, lagu Iwan Fals memiliki signifikansi politik yang sangat radikal karena memberikan edukasi kesadaran kelas bagi masyarakat luas. Ketika saluran politik formal disumbat oleh instrumen kekuasaan Orde Baru, teks musik populer mengambil alih fungsi tersebut sebagai ruang publik alternatif (*alternative public sphere*). Iwan Fals merebut otoritas untuk mendefinisikan makna tentang apa dan siapa "wakil rakyat" yang sebenarnya, meruntuhkan legitimasi kultural pejabat publik, dan menaruh kembali kedaulatan berpikir di tangan pendengar/rakyat yang tertindas.

Simpulan

Berdasarkan analisis semiotika Roland Barthes terhadap lirik lagu "Surat Buat Wakil Rakyat" karya Iwan Fals, penelitian ini menghasilkan dua temuan utama yang menjawab rumusan masalah penelitian.

Pertama, proses signifikasi dalam lirik lagu ini berlangsung secara berjenjang melalui tiga tataran pemaknaan Barthesian. Pada tataran denotatif, diksi-diksi seperti "duduk sambil membaca", "kekenyangan", dan "tidur waktu sidang" hanya merekam aktivitas administratif dan fisiologis yang lumrah tanpa muatan ideologis. Namun, ketika tanda-tanda tersebut bergerak ke tataran konotatif, maknanya berekspansi secara radikal: "kekenyangan" menjelma menjadi simbol keserakahan dan privilese ekonomi elite birokrat, "tidur waktu sidang" menjadi metafora pengkhianatan struktural dan matinya empati politik, sementara frasa "di kantong baju mu ada kami, di dalam dompet mu ada kami" mengonotasikan komodifikasi rakyat sebagai instrumen akumulasi kekayaan pejabat. Pergeseran makna ini menunjukkan bahwa lirik Iwan Fals sengaja memanfaatkan kesederhanaan denotatif untuk membuka ruang interpretasi konotatif yang sarat kritik sosiopolitis.

Kedua, pada tataran mitos, teks lirik ini berfungsi sebagai instrumen kontrahegemonik yang membongkar mitos politik yang dilanggengkan rezim Orde Baru, yaitu citra DPR sebagai lembaga musyawarah-mufakat yang luhur, suci, dan representatif. Melalui ironi, sarkasme, dan personifikasi, Iwan Fals mendekonstruksi mitos tersebut dan menyodorkan mitos tandingan (*counter-myth*): parlemen yang sesungguhnya telah tereduksi menjadi lembaga "tukang stempel" yang pasif terhadap eksekutif, sebagaimana tercermin dalam konteks historis dominasi Golkar dan F-ABRI yang menguasai hampir 80% kursi DPR hasil Pemilu 1987. Proses naturalisasi ideologi yang dijalankan negara melalui media-media resminya berhasil diretakkan oleh teks budaya populer ini.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa lagu "Surat Buat Wakil Rakyat" bukan sekadar karya estetik, melainkan teks kontrahegemonik yang berperan sebagai ruang publik alternatif (*alternative public sphere*) di tengah represi terhadap kebebasan berekspresi pada era Orde Baru. Lagu ini berhasil merebut otoritas pemaknaan atas konsep "wakil rakyat" dari genggaman wacana resmi negara, sekaligus membangkitkan kesadaran kritis kolektif masyarakat terhadap disfungsi institusi legislatif. Relevansi kritik ini terbukti melampaui konteks temporalnya, mengingat persoalan disfungsi parlemen, kesenjangan elite-rakyat, dan praktik politik yang jauh dari aspirasi konstituen masih menjadi isu aktual dalam dinamika politik Indonesia kontemporer, sehingga menegaskan daya tahan teks ini sebagai artefak kritik sosial yang abadi (*timeless social critique*).

Berbeda dari kajian-kajian terdahulu, penelitian ini menempati posisi yang berbeda baik dari segi objek maupun kerangka analisis. Mukminin dkk. (2024) menerapkan semiotika Barthesian pada lagu "Bingung" karya Iksan Skuter, dengan fokus pada representasi kritik sosial seperti stigmatisasi ideologi, stereotip agama-budaya, dan ketidakadilan sistem hukum. Sementara itu, Fiddaraini (2025) mengkaji lagu "Bento" karya Iwan Fals menggunakan analisis wacana kritis model Teun A. van Dijk untuk membongkar arogansi dan korupsi elite Orde Baru melalui dimensi teks, kognisi sosial, dan konteks sosial. Penelitian ini melengkapi kedua kajian tersebut dengan menggabungkan objek material karya Iwan Fals dan kerangka semiotika Barthesian secara simultan. Suatu kombinasi yang belum ditemukan dalam penelitian sejenis, serta memusatkan analisis secara spesifik pada tataran mitos sebagai instrumen kontra-hegemonik yang mendekonstruksi legitimasi institusi DPR pada era Orde Baru. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian semiotika musik populer di Indonesia, sekaligus membuka ruang bagi penelitian lanjutan yang mengeksplorasi karya-karya musik kritik sosial lainnya, baik dari era Orde Baru maupun era reformasi, dengan kerangka analisis yang serupa atau pendekatan interdisipliner lainnya.

Pernyataan Konflik Kepentingan

Penulis menyatakan bahwa artikel ini bebas dari konflik kepentingan dalam proses pengumpulan data, analisis data, proses editorial, maupun proses publikasi secara keseluruhan. Tidak terdapat hubungan finansial, afiliasi institusional, maupun hubungan personal yang dapat memengaruhi objektivitas penelitian dan penulisan artikel ini.

Pernyataan Penggunaan AI Generatif

Dalam proses penyusunan naskah ini, penulis menggunakan alat akal imitasi (*artificial intelligence*/AI) berupa Claude (Anthropic). Alat tersebut digunakan pada tahap penulisan naskah, dengan tujuan membantu proses parafrase kalimat, penerjemahan teks dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris (khususnya bagian abstrak dan judul), serta penyempurnaan struktur dan pilihan kata pada beberapa bagian narasi. Penggunaan AI dilakukan dengan cara memberikan draf kalimat atau paragraf yang telah disusun penulis, kemudian meminta AI untuk membantu memperbaiki kejelasan bahasa, konsistensi istilah, dan padanan terjemahan, yang selanjutnya diperiksa, disunting, dan diverifikasi kembali oleh penulis.

Seluruh gagasan inti, kerangka teoretis, metode penelitian, proses analisis data, interpretasi temuan, dan simpulan penelitian sepenuhnya merupakan hasil kerja dan tanggung jawab penulis, tanpa keterlibatan AI dalam pengambilan keputusan substantif dalam keilmuan.

Referensi

Adom, D., Hussein, E. K., & Agyem, J. A. (2018). Theoretical and conceptual framework: Mandatory ingredients of a quality research. *International Journal of Scientific Research*, 7(1), 438–441. https://doi.org/10.36106/IJSR

Barus, E., Aisyah, A., Siregar, E. F., & Risnawaty. (2025). An analysis of Roland Barthes' semiotic theory: Focusing on denotation, connotation, and myth. *International Journal of Educational Research Excellence*, 4(2), 355–363. https://doi.org/10.55299/ijere.v4i2.1438

Darmawan, M. Y. (2020). Iwan Fals, music, and the voice of resistance. *I-Pop: International Journal of Indonesian Popular Culture and Communication*, 1(1), 41–62. https://doi.org/10.36782/i-pop.v1i1.28

Fiddaraini, S. (2025). Wacana kritis lagu "Bento" karya Iwan Fals: Representasi ideologi dominasi dan kekuasaan elit Orde Baru (Model Teun A. van Dijk). *Perspektif: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Bahasa*, 3(4), 33–44. https://doi.org/10.59059/perspektif.v3i4.2860

Jadou, S. H., & Al Ghabra, I. M. M. M. (2021). Barthes' semiotic theory and interpretation of signs. *International Journal of Research in Social Sciences & Humanities*, 11(3), 470–482. https://doi.org/10.37648/ijrssh.v11i03.027

Mukminin, M. S., Prasetya, K., Muhhit, A. A., Yaman, N., & Sari, Y. T. (2024). Representasi kritik sosial dalam lirik lagu Bingung karya Iksan Skuter: Analisis semiotika Roland Barthes. *J-LELC: Journal of Language Education, Linguistics, and Culture*, 4(3), 29–39. https://doi.org/10.25299/jlelc.2024.19217

Murigi, J. M. (2024). Popular culture and political repression: The rejection of political repression through language. *International Journal of Research and Innovation in Social Science*, 8(1), 99–111. https://doi.org/10.47772/IJRISS.2024.801009

Suci, P., & Suri, I. (2024). Analyzing the electoral reform journey of Indonesia from 2004–2023: Value demands or power needs? *Jurnal Politica: Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional*, 15(2), 167–184. https://doi.org/10.22212/jp.v15i2.4459

Rajab, B. (2022). Otoritarianisme-birokratik Orde Baru, krisis ekonomi dan politik, dan demokrasi formal masa reformasi. *Jurnal Politik Indonesia*, 8(1), 59–78. https://doi.org/10.20473/jpi.v8i1.21817

Rudy, R. (2024). Reading signs in films through Barthes' semiotics. *JOLALI: Journal of Language and Literature*, 2(1), 5–11. https://doi.org/10.35842/jolali.v2i1.13

Safi'i, M. (2022). Kegigihan dan keberanian Iwan Fals dalam mengkritisi para petinggi negara dengan lagunya. *Krinok: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Sejarah*, 1(1), 101–108. https://doi.org/10.22437/krinok.v1i1.17991

Simbolon, R., Karo, Y. F. B., Tarigan, T. A., Dongoran, R., & Simbolon, R. (2023). Perkembangan jumlah fraksi DPR RI masa Orde Baru hingga Reformasi (1966–2004). *Puteri Hijau: Jurnal Pendidikan Sejarah*, 8(1), 112–118. https://doi.org/10.24114/ph.v8i1.44342

Smith, A. L. A. C. (1983). Roland Barthes. [Data publikasi belum berhasil diverifikasi].

Supriyono. (2024). Research methodology: Qualitative approach [Lecture notes]. https://doi.org/10.13140/RG.2.2.26723.57121

Varianus, W. (2024). Menyimak ketidakadilan dalam konteks perkembangan politik di Indonesia. *Rhizome: Jurnal Kajian Ilmu Humaniora*, 4(2), 52–57. https://doi.org/10.56393/rhizome.v4i2.2419

Wahyudin, W., & Absor, N. F. (2022). Masyarakat kelas bawah dalam lirik lagu-lagu Iwan Fals (1981–1994). *Estoria: Journal of Social Science and Humanities*, 2(2), 302–316. https://doi.org/10.30998/je.v2i2.937

Woo, D. (2024). The role of protest music in social movements and youth activism across eras. *Journal of Student Research*, 13(4), 1–7. https://doi.org/10.47611/jsrhs.v13i4.8176

Zhang, S.-p. (2017). A survey on Roland Barthes' Myth Today. *US-China Foreign Language*, 15(3), 209–214. https://doi.org/10.17265/1539-8080/2017.03.008

Bionarasi

Lutfia Okta Riwayati merupakan dosen Jurusan Karawitan, Institut Seni Indonesia Surakarta. Ia menyelesaikan pendidikan sarjana pada Jurusan Musik Barat, Institut Seni Indonesia Yogyakarta, kemudian melanjutkan studi pascasarjana pada Program Studi Pengkajian Seni Rupa dan Seni Pertunjukan, Universitas Gadjah Mada.

Anantha Anggraeni Sitio merupakan dosen Jurusan Karawitan, Institut Seni Indonesia Surakarta. Ia menyelesaikan pendidikan sarjana pada Program Studi Etnomusikologi, Universitas Sumatera Utara, kemudian melanjutkan studi magister dengan minat pengkajian seni di Institut Seni Indonesia Yogyakarta.

Dian Nastiti merupakan dosen Jurusan Karawitan, Institut Seni Indonesia Surakarta. Selain menjalankan tugas sebagai dosen, ia juga bertugas sebagai supervisor pendidikan dan pelatihan (diklat) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam moda daring sejak 2020. Ia menyelesaikan pendidikan sarjana dan magister pada bidang Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Universitas Negeri Yogyakarta.

Riwayat Publikasi

Diajukan	Direvisi	Diterima	Dipublikasikan
28 Juni 2026	10 Oktober 2026	15 Oktober 2026	18 Oktober 2026

© Riwayati, Sitio, Nastiti (2026)